

## **Perencanaan Dasar Dalam Mengukur Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dan Indeks Literasi Masyarakat (ILM)**

**Endang Fatmawati**  
**Universits Diponegoro, Semarang**  
**E-mail: eenfat@yahoo.com**

### **ABSTRAK**

Artikel membahas contoh rencana bagaimana mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) sehingga tidak ada hasil penelitian. Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung dari berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan membaca masyarakat. Dalam menentukan kebijakan penyusunan program dan indikator keberhasilan dibutuhkan kajian ilmiah yang dilakukan secara berkala. Formulasi pengukuran IPLM dan ILM perlu dilakukan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Penelitian IPLM bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka. Sementara itu, penelitian ILM disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks literasi masyarakatnya. Pengukuran IPLM dapat dilakukan dengan pendekatan sensus, sedangkan penelitian ILM dengan teknik sampling menggunakan instrumen penelitian yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan sudah menjadi standar nasional. Kriteria responden yang menjadi sumber data penelitian ILM adalah penduduk berusia berkisar 15 - 64 tahun. Pengukuran variabel ILM diukur dari kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, pemahaman bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan, serta transformasi menjadi produk/jasa. Hasil kajian IPLM dan ILM sebagai acuan atau panduan bersama dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan perpustakaan dan program peningkatan IPLM dan ILM. Semoga artikel ini dapat memberikan gambaran awal bagi praktisi penelitian sensus dan penelitian survei dalam implikasi penelitian IPLM dan ILM selanjutnya.

**Kata Kunci:** IPLM, ILM, indeks, perpustakaan, literasi

### **ABSTRACT**

The article only discusses planning example how to measure the Community Literacy Developmpnet Index (CLDI) and Community Literacy Index (CLI) so there are no research results. Aspects that affect people's reading ability also determine the literacy development of Indonesian society. Scientific studies need to be carried out periodically to determine program development policies and indicators of success. The formulation of the measurement of the CLDI and the CLI needs to be carried out in all districts/cities and provinces in Indonesia. The purpose of CLDI research is to find out the

condition of all types of libraries, both from the aspect of library distribution, collections, facilities and infrastructure, library staff, and users. Meanwhile, CLI research is adapted to the conditions of the community and analyzes the factors that influence it. Measurement of CLDI is carried out using a census approach, while CLI research is carried out using a sampling technique using research instruments set by the National Library as a national standard. The focus of CLI research with the age criteria of respondents ranging from 15 - 64 years. CLI variables are measured from reading ability, speaking ability, writing ability, reading comprehension, knowledge exploration, transformation into knowledge, and transformation into product/service. The results of the CLDI and CLI studies are a joint reference in making policies for library development and index improvement programs. Finally, it is hoped that this article can provide an overview for practitioners of census research and survey research on the implications of future CLDI and CLI research.

**Keywords:** CLDI, CLI, index, library, literacy

## **PENDAHULUAN**

Penelitian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) dilakukan untuk penentuan kebijakan penyusunan program perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, dijelaskan bahwa IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Pengukuran IPLM dan ILM akan menjadi sistem yang bukan hanya untuk menjawab IKK urusan perpustakaan saja, tetapi urgensinya sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan dan pembinaan perpustakaan, strategi pengembangan perpustakaan, dasar penyusunan arah kebijakan perpustakaan, serta strategi peningkatan literasi masyarakat. Selain itu, skor IPLM dan ILM yang dihasilkan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diharapkan dapat memberikan potret fenomena perkembangan dan pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan, serta literasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses ke perpustakaan dan layanannya, maupun memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Ariestonandri (2020) melalui PT Sigma Research Indonesia telah melakukan penelitian IPLM dengan indikator pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari, jumlah perpustakaan yang sudah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, maupun jumlah anggota perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai IPLM tahun 2020 sebesar 12,93%. Artinya, jika dibandingkan dengan nilai 10,12% pada tahun 2018, ternyata ada kenaikan. Agar ada standarnya maka dalam menentukan kebijakan penyusunan program perpustakaan beserta

indikator keberhasilannya, dibutuhkan kajian dan tolok ukur secara berkala. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Apalagi sasaran strategis Perpustnas RI tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca. Fatmawati (2022) menyebutkan bahwa indeks gemar membaca merupakan nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. Tahun 2022, saya (sebagai anggota tim peneliti) bersama dengan 6 (enam) peneliti lainnya (yang diketuai oleh Budi Warsito), melakukan penelitian terkait IPLM dan ILM di Kota Salatiga. Dari penelitian tersebut, Warsito, dkk. (2022) melaporkan bahwa setelah dilakukan sensus terhadap 302 perpustakaan di 4 (empat) kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil bahwa IPLM Kota Salatiga sebesar 72,83 atau termasuk dalam tingkatan “sedang (memenuhi standar)”. Sementara itu, hasil penelitian terkait ILM di Kota Salatiga, bahwa jumlah responden yang dijadikan sampel untuk ILM sebanyak 400 responden. Kesimpulan dari kegiatan survei ILM, yaitu nilai ILM di Kota Salatiga sebesar 63,14 atau termasuk dalam kategori “sedang”. Nilai ILM tertinggi terdapat di Kecamatan Argomulyo sebesar 66,30, dan nilai terendah terdapat di Kecamatan Tingkir dengan nilai 54,66.

Artikel membahas tujuan pengukuran IPLM dan ILM, contoh rencana pengukuran IPLM dan ILM dan variabelnya, serta perencanaan kajian IPLM dan ILM. Penulisan artikel bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada para pemangku kepentingan khususnya perpustakaan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia agar selalu mengevaluasi kebijakan program pengembangan perpustakaan, yang salah satunya berdasarkan hasil kajian IPLM dan ILM. Artikel ini secara konsekuen merekomendasikan bahwa pentingnya bagi perpustakaan di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kajian IPLM dan ILM untuk penentuan kebijakan penyusunan program perpustakaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tingkat perkembangan literasi masyarakat tergantung pada kegemaran membaca masyarakatnya. Pemerintah negara Indonesia harus mendorong pengembangan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia berkontribusi terhadap literasi dan pembangunan (Biao, et al., 2014). Literasi informasi menjadi salah satu kualitas yang diperlukan dalam praktik keselamatan saat ini dan masa depan (Guo, et al., 2022). Berdasarkan Statistik Indonesia (2022), dari 34 provinsi di Indonesia, hanya sembilan provinsi yang termasuk kategori sedang, 24 lainnya dalam kategori literasi rendah, dan satu provinsi kategorinya sangat rendah. Tingkat minat membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan 59,92 (durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per kuartal).

Upaya menggabungkan pengajaran membaca dan sains, memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman bacaan sains dan pembelajaran konten sains, serta membantu mempromosikan pengembangan literasi sains. Hal ini mendukung argumen teoritis dengan menggabungkan membaca dan sains, misalnya jika siswa diberikan waktu untuk membaca teks sains dan diajarkan bagaimana menggunakan strategi membaca, maka mereka tidak akan hanya menjadi pembaca yang lebih mahir saja tetapi juga belajar konten sains yang lebih efektif (Fang and Way, 2010). Dalam konteks ini, siswa juga perlu didorong membentuk komunitas dan literasi kritis (Shelton, Guy, Jones, 2020).

Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) memetakan tingkat aktivitas literasi pada 34 provinsi di Indonesia dan menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) 2018. Tingkat aktivitas literasi masyarakat diukur dengan empat dimensi, yaitu kecakapan, akses, alternatif, dan budaya. Hasilnya hanya dimensi kecakapan yang sudah cukup baik, sedangkan ketiga dimensi lainnya masih rendah.

Dalam lampiran Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, dijelaskan bahwa perpustakaan sebagai leading sector pengembangan dan pembinaan kegemaran membaca diamanatkan

untuk menjalankan sejumlah program terkait dengan pengembangan budaya literasi. Data dari PT Sigma Research Indonesia yang disiapkan untuk Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (P3MB) Perpusnas RI (2021), dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya, angka IPLM menunjukkan peningkatan dari 10,12 menjadi 12,93. Bahkan UPLM2 (ketercukupan koleksi) meningkat tinggi dari 0,0621 (tahun 2018) menjadi 0,08325 (tahun 2020). Terkait top 5 IPLM tertinggi tahun 2020 adalah Provinsi Kalimantan Selatan (48,70), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (28,83), Provinsi Gorontalo (28,18), Provinsi Kalimantan Timur (20,78), dan Provinsi DKI Jakarta (18,91). Untuk IPLM tertinggi dan terendahnya dapat dicermati pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Top 5 dan Bottom 5 Skor IPLM Tahun 2018 dan 2020  
(Sumber: P3MB Perpusnas RI, 2021: 36)

Studi literasi yang dilakukan oleh lembaga literasi internasional, seperti halnya Programme for International Students Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa kemampuan literasi anak Indonesia masih sangat rendah. Indikasi dari lemahnya kemampuan membaca anak Indonesia, dapat juga dilihat dari data World's Most Literate Nations (2016) oleh Central Connecticut State University, bahwa peringkat literasi Indonesia yaitu 60 dari 61 negara yang diteliti, dan hanya lebih baik dari Botswana yang merupakan peringkat 61.

Indonesia masih tergolong rendah terkait peringkat PISA. Kondisi ini menjadi tantangan masyarakat Indonesia di tingkat global. Jika berdasar pada PISA (2015) oleh Organization for Economic Co-Operation

Development (OECD), bahwa performa membaca (performance of reading) di 70 negara yang diteliti, Indonesia mendapat skor 397 jauh di bawah rata-rata skor OECD (493). Namun, hasil survei PISA tahun 2018 yang dirilis oleh OECD justru memprihatinkan. Hasil menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371 dan berada di posisi 74 (peringkat ke-6 dari bawah). Untuk skor rata-rata kemampuan Matematika mendapat 379 (posisi 73) dan untuk kemampuan Sains mencapai 396 (posisi 71).

Data dari UNESCO (2020) menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001. Hal ini diasumsikan bahwa dari 1000 orang, maka hanya satu orang yang suka membaca. Sungguh masih ketinggalan karena Indonesia menempati urutan sangat rendah, tepatnya kedua dari bawah dalam hal literasi dunia. Menurut PIRLS tahun 2011, hasil uji prestasi membaca (reading achievement) di 49 negara, dengan responden pelajar kelas 4 s.d. 6 SD dengan interval usia 9 s.d. 12 tahun, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada skor 428. Hal ini artinya, jauh di bawah skor batas rata-rata PIRLS dan berada pada urutan ke-42 dari 49 negara atau ke-7 dari bawah dengan prestasi membaca rendah. Literasi menurut PIRLS bisa jadi cerminan kemampuan berbahasa yang kompleks dan cukup memberikan gambaran kemampuan berbahasa secara mendalam.

Kondisi Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di masing-masing provinsi berbeda-beda. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang memiliki rata-rata TGM peringkat tinggi. Namun, skor IPLM di Provinsi Jateng hanya 11,33 (peringkat 15 dari 34 provinsi). Padahal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 sudah disinggung bahwa perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jawa Tengah sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca.

Terkait dengan peningkatan gemar membaca, maka pelatihan dan kegiatan perpustakaan harus disesuaikan dengan minat masyarakat. Apalagi era digital saat ini, bimbingan teknis (bimtek) penelusuran informasi digital menggunakan perangkat digital bagi masyarakat juga harus dilakukan

secara berkelanjutan. Target sarannya bisa dari kategori anak-anak, remaja, dewasa, dengan tema literasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka. Sebagai contoh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, telah melakukan inovasi, yaitu bus jemput anak sekolah baca buku (bejanaku); pelatihan komputer untuk masyarakat kurang mampu (ulat kupu); pojok baca digital; pinjam buku cara online (jambu carlin); kartu tanda anggota perpustakaan berbasis nomor induk kependudukan (kanda pusta berindu), maupun perpustakaan keliling.

Layanan perpustakaan adalah ujung tombak bagi sebuah perpustakaan (Fatmawati, 2021). Oleh karena itu, perlu didukung oleh tenaga perpustakaan yang kompeten. Terkait dengan kompetensi tenaga perpustakaan, perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan program studi ilmu perpustakaan maupun organisasi profesi kepustakawanan. Pihak perpustakaan dapat membangun jejaring dengan organisasi profesi atau stakeholder lainnya, kemudian mengadakan kegiatan tertentu untuk membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap dunia literasi. Disamping itu, pustakawan dapat membantu masyarakat berpikir kritis, menelurkan ide kreatif, dan inovatif menggali ide untuk meningkatkan kemampuan literasi untuk kesejahteraan. Dalam suatu acara tertentu, pustakawan bisa menyelenggarakan pameran produk wirausaha hasil kerajinan masyarakat dan memberikan literasi bisnis digital sehingga diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini bukan berupa hasil penelitian. Isi artikel lebih kepada memberikan contoh dengan kajian teori bagaimana mengukur IPLM dan ILM. Oleh karena itu, artikel tidak ada hasil penelitian, tetapi lebih berupa hasil pembahasan teoritis yang terkait pedoman bagaimana mengukur IPLM dan ILM. Metode dilakukan dengan studi literatur yang mengacu pada pedoman dari Perpustnas RI ditambah dengan literatur lain yang relevan dengan topik IPLM dan ILM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Tujuan Pengukuran IPLM dan ILM

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan kini telah menjadi urusan pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Angka indeks merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indeks menjadi ukuran sederhana berupa angka tetapi menggambarkan secara komprehensif dan holistik dari gejala sosial yang diukur.

Formulasi pengukuran IPLM memerlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan. Dengan demikian, disparitas pembangunan dapat diminimalisir sehingga sebarannya dapat adil antar provinsi dan kabupaten/kota. Hingga di penghujung tahun 2022 ini, pemerintah sudah intens mengupayakan peningkatan angka kegemaran membaca dengan berbagai program yang konstruktif, misalnya menerbitkan pedoman kajian IPLM dan ILM, gencar bersosialisasi, menyelenggarakan webinar di berbagai wilayah, bimtek, pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta kegiatan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan IPLM dan ILM, perpustakaan umum dapat mendorong inisiasi masyarakat mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk menggelorakan budaya literasi. Dalam konteks ini, perpustakaan dapat berkontribusi nyata dalam kegiatan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan secara intens. Selanjutnya perlu juga disadari bahwa oleh karena perkembangan media dan konten digital telah merubah perilaku pencarian informasi masyarakat, maka perpustakaan juga wajib menyediakan sumber informasi elektronik.

Tujuan pelaksanaan kegiatan kajian IPLM yaitu untuk mengukur usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah di daerah tertentu dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar

sepanjang hayat dalam rangka mencapai budaya literasi masyarakat. Penjabaran tujuan yang ingin dicapai ketika mengukur IPLM, yaitu:

- Menganalisis UPLM1 Pemerataan layanan perpustakaan;
- Menganalisis UPLM2 Ketercukupan koleksi;
- Menganalisis UPLM3 Ketercukupan tenaga perpustakaan;
- Menganalisis UPLM4 Tingkat kunjungan masyarakat per hari;
- Menganalisis UPLM5 Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP;
- Menganalisis UPLM6 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi;
- Menganalisis UPLM7 Jumlah anggota perpustakaan;

Mengukur angka IPLM;

Menyusun rekapitulasi data perpustakaan berdasarkan segmentasi wilayah kecamatan pada perpustakaan umum dan sekolah; dan

Menyusun strategi/rekomendasi peningkatan angka IPLM berdasarkan jenis perpustakaan.

Selanjutnya penelitian ILM dirancang sebagai penelitian eksploratori (kuantitatif) menggunakan dimensi output. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan bukan alat ukur secara langsung. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan pada pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan RI dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan data dan analisis di masing-masing daerah. Tujuan dilaksanakannya pengukuran ILM adalah untuk mengetahui angka tingkat literasi masyarakat dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Penjabaran tujuan yang akan dicapai dari pengukuran ILM, meliputi:

- Mengukur angka ILM di daerah yang dikaji;
- Menganalisis variabel pembentuk ILM, yang terdiri atas: kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan pemahaman bacaan, eksplorasi informasi, transformasi informasi menjadi pengetahuan, serta transformasi pengetahuan menjadi produk barang/jasa;
- Menganalisis preferensi kegiatan pengembangan diri terkait Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS); dan

Menyusun strategi atau rekomendasi peningkatan angka ILM.

### Contoh Rencana Pengukuran IPLM

Pengukuran IPLM dilakukan secara berjenjang dan bottom up. Artinya pengukuran skor indeks dimulai dari level terbawah yakni level kabupaten/kota, kemudian ke provinsi, hingga ke nasional. Hal ini agar tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih (overlapping) dalam pengukuran, baik di level kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Dengan demikian, koordinasi dan sinergi antara ketiga level dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan dapat tercapai, terkontrol, dan terjalin dengan baik.

Rumus pengukuran IPLM terdiri atas dua komponen, yaitu komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Berikut adalah rumus pengukuran IPLM:

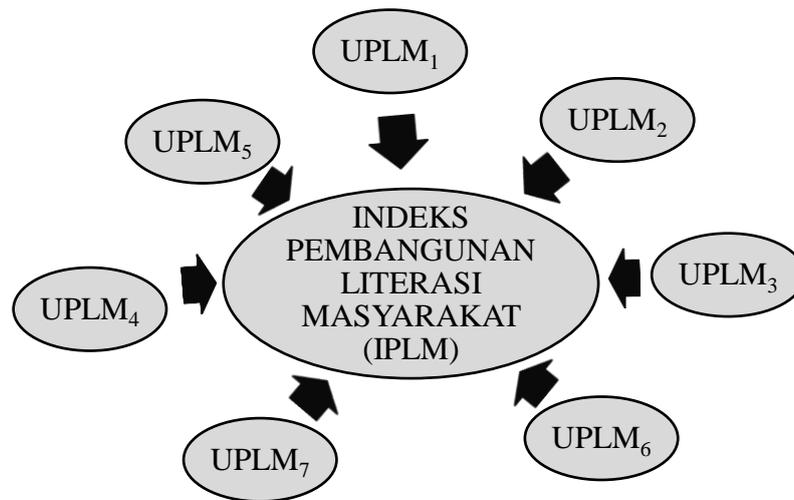
$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLMi : Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur PLM

AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasar lokus/jenis perpustakaan

Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca Perpusnas RI telah menyusun UPLM yang terdiri atas tujuh komponen seperti diilustrasikan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tujuh Komponen UPLM

Instrumen kajian IPLM sebetulnya perlu dipertimbangkan juga terkait dengan kesesuaian koleksi dan kebutuhan koleksi oleh pemustaka. Ketujuh komponen UPLM pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM<sub>1</sub>). Rumus yang digunakan untuk mengukurnya, terdiri dari rasio ketersediaan di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Pemerataan layanan perpustakaan dilihat dari berapa jumlah perpustakaan yang memang beroperasi dari target yang sudah ditentukan sebelumnya. Aspek masyarakat sebagai unsur pembagi bisa diperoleh dari data sekunder, misalnya dari laporan BPS maupun laporan Kominfo berupa Data Statistik Sektoral. Selain itu, data sekunder juga bisa diperoleh dari data sekunder instansi terkait, misalnya buku statistik sektoral milik Kominfo untuk data masyarakat bekerja, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jumlah civitas sekolah, Sistem manajemen data Education Management Information System (EMIS), dan lain sebagainya. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM<sub>1</sub>:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

2. Ketercukupan koleksi (UPLM2). Rumus yang digunakan untuk mengukur dalam satuan judul, terdiri dari rasio ketercukupan koleksi, baik tercetak maupun digital pada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM2:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3). Rumus yang digunakan untuk mengukur terdiri dari rasio ketercukupan tenaga (baik pustakawan dan tenaga teknis) di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM3:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4). Rumus yang digunakan untuk mengukur terdiri dari rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari (secara onsite maupun online) di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, serta tingkat kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM4:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5). Rumus yang digunakan terdiri dari rasio jumlah perpustakaan yang dibina berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan/atau memiliki NPP di perpustakaan umum, perpustakaan

sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM5:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6). Rumus yang digunakan terdiri dari rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), civitas sekolah, civitas akademik, dan karyawan/pegawai. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM6:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

7. Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7). Rumus yang digunakan terdiri dari rasio jumlah anggota perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM7:

$$50\% \left[ \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[ \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[ \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Untuk komponen aspek masyarakat disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan. Hal ini bisa dijelaskan sebagaimana Gambar 3 berikut:

Perpustakaan Umum		Perpustakaan Sekolah/Madrasah		Perpustakaan Perguruan Tinggi		Perpustakaan Khusus	
Jumlah populasi penduduk: Provinsi, Kabupaten/Kota	Sumber: Laporan statistik tahunan BPS: Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah civitas sekolah: peserta didik/Siswa, Guru	Sumber: Laman Dapodik Kemendikbu dristek; Laman EMIS Pendidikan Islam, Kemenag	Jumlah civitas akademik: Mahasiswa, Tenaga edukatif/Dosen	Sumber: Laporan statistik tahunan BPS: Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah populasi bekerja	Sumber: Laporan statistik tahunan BPS

Gambar 3. Aspek Masyarakat Berdasarkan Jenis Perpustakaan

Sumber data resmi yang digunakan sebagai komponen aspek masyarakat dalam penerapan rumus IPLM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Populasi Penduduk

Data yang digunakan pada populasi penduduk, baik level provinsi maupun kabupaten/kota, adalah dengan mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data yang digunakan untuk jumlah populasi penduduk, antara lain:

#### a. Populasi penduduk per provinsi

Bisa menggunakan publikasi tahunan BPS dengan judul Statistik Indonesia atau publikasi dari BPS Provinsi, misalnya Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Berikut contoh tampilan laman web BPS (<https://bps.go.id>) yang menampilkan laman unduhan publikasi Statistik Indonesia 2022 untuk mengakses data statistik level nasional:



Gambar 4. Tampilan Laman Web Statistik Indonesia 2022

Untuk data statistik level provinsi atau kabupaten/kota bisa mengakses laman web BPS provinsi atau kabupaten/kota. Untuk mendapatkan data

populasi penduduk tingkat kabupaten/kota, merujuk pada bab penduduk atau kependudukan dalam publikasi statistik tahunan BPS. Berikut contoh laman web unduhan laporan tahunan BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022:



Gambar 5. Tampilan Laman Web BPS Provinsi Jateng

Ketika melakukan penelitian di salah satu kabupaten di Provinsi Jateng, misalnya Kabupaten Klaten, maka untuk mendapatkan data populasi penduduk Kabupaten Klaten, dapat merujuk pada bab Penduduk atau Kependudukan dalam dokumen statistik BPS. Tepatnya pada tabel penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk. Contoh untuk Kabupaten Klaten, tampilan lamannya seperti Gambar 6 berikut:

Gambar 6. Contoh Laporan BPS Jumlah Penduduk Kab. Klaten

b. Populasi penduduk per kabupaten/kota

Selain bisa menggunakan publikasi tahunan BPS level provinsi, juga bisa menggunakan publikasi tahunan BPS pada level kabupaten/kota. Berikut

adalah contoh tampilan laman web BPS Kabupaten Klaten Dalam Angka 2022:

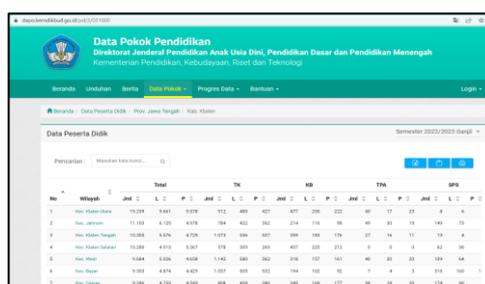


Gambar 7. Contoh Tampilan Laman Web Unduhan Laporan BPS Kab. Klaten

## 2. Populasi Civitas Sekolah

Data yang digunakan pada populasi civitas sekolah adalah data populasi jumlah siswa dan guru. Datanya adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Sumber data resmi yang digunakan pada komponen ini adalah laman web resmi Dapodik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan EMIS Pendidikan Islam dari Kementerian Agama. Berikut adalah alamat URL dari sumber data populasi civitas sekolah:

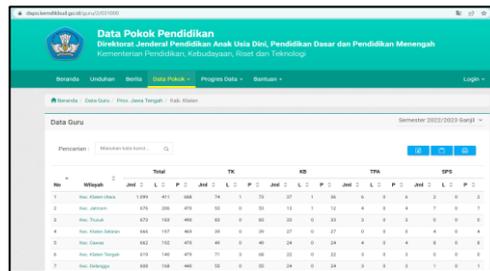
Jumlah siswa/peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dapat mengakses laman: <https://dapodik.kemdikbud.go.id/pd>.



No	Kategori	Total				TK				TMA				UMK			
		JAN 21	LE 21	PI 21	PP 21	JAN 21	LE 21	PI 21	PP 21	JAN 21	LE 21	PI 21	PP 21	JAN 21	LE 21	PI 21	PP 21
1	New Kabupaten	10.239	9.941	9.779	912	889	427	877	209	222	46	17	23	2	3	4	
2	New Kabupaten	11.183	4.120	4.078	704	422	362	274	174	98	49	31	19	149	73		
3	New Kabupaten	10.263	9.576	9.729	1.073	896	897	889	760	176	27	16	11	18	4		
4	New Kabupaten	10.280	4.078	4.067	478	469	389	487	200	212	0	0	0	42	36		
5	New Kabupaten	9.244	9.556	9.558	1.742	360	362	319	107	141	40	20	20	100	14		
6	New Kabupaten	9.263	4.074	4.020	1.037	893	100	104	100	10	7	4	3	174	169		
7	New Kabupaten	9.274	4.120	4.060	374	360	360	345	124	101	36	18	20	174	16		

Gambar 8. Contoh Tampilan Laman Web Dapodik Kab. Klaten

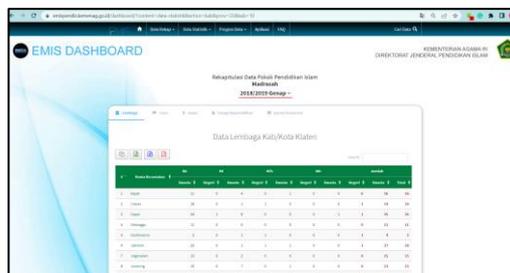
Jumlah guru tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dapat mengakses laman: <https://dapodik.kemdikbud.go.id/guru>.



Masa	Jumlah	TK		KB		TPA		SPT	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2021	1.200	450	37,5%	150	12,5%	300	25%	100	8,3%
2022	1.300	480	36,9%	160	12,3%	320	24,6%	110	8,5%
2023	1.400	500	35,7%	170	12,1%	340	24,3%	110	7,9%

Gambar 9. Contoh Tampilan Laman Web Data Guru Kab. Klaten

Jumlah siswa/peserta didik dan guru pada tingkat MI, MTs dan MA, dapat mengakses laman EMIS Pendidikan Islam pada laman web: <https://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik>.



Masa	Jumlah	MI		MTs		MA	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2021	1.200	450	37,5%	150	12,5%	300	25%
2022	1.300	480	36,9%	160	12,3%	320	24,6%
2023	1.400	500	35,7%	170	12,1%	340	24,3%

Gambar 10. Contoh Tampilan Laman Web Data Madrasah Kab. Klaten

Gambar 10 merupakan contoh tampilan laman dari data civitas sekolah dari madrasah yang bersumber dari laman web EMIS Pendidikan Islam (Pendis) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Data yang disajikan dalam laman web tersebut berisi jumlah peserta didik/siswa dan guru dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang disusun berdasarkan urutan kecamatan di Kabupaten Klaten.

### 3. Populasi Civitas Akademik

Data yang digunakan adalah data populasi jumlah civitas akademik (mahasiswa dan dosen). Sumber data resmi yang dapat digunakan adalah publikasi tahunan BPS level provinsi atau kabupaten/kota. Berikut adalah contoh tampilan tabel data jumlah perguruan tinggi (3 tahun terakhir)

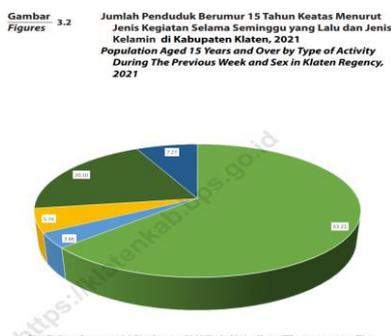
menurut kecamatan di Kabupaten Klaten yang bisa digunakan untuk data Aspek Masyarakat pada civitas akademik:

Kecamatan Subdistrik	Perguruan Tinggi			
	2019	2020	2021	2022
01 Purbasari	191	191	191	191
02 Gandiwarma	—	—	—	—
03 Wedi	—	—	—	—
04 Bayat	—	—	—	—
05 Cawas	—	—	—	—
06 Trusmi	—	—	—	—
07 Kaskabes	—	—	—	—
08 Kebonarum	1	1	1	1
09 Jopu	—	—	—	—
10 Muningsongo	—	—	—	—
11 Karanganyar	—	—	—	—
12 Ngawen	—	—	—	—
13 Cepur	2	2	2	2
14 Pledan	—	—	—	—
15 Karangdowo	—	—	—	—
16 Jawiring	—	—	—	—
17 Wonorejo	—	—	—	—
18 Delungga	1	1	1	1
19 Padasari	—	—	—	—
20 Karanganyar	—	—	—	—
21 Sukoharjo	—	—	—	—
22 Jaten	—	—	—	—
23 Komalangsari	—	—	—	—
24 Klaten Selatan	1	1	1	1
25 Klaten Tengah	2	2	2	2

Gambar 11. Contoh Laman Laporan BPS Jumlah Perguruan Tinggi

#### 4. Populasi Penduduk Bekerja

Data pada populasi penduduk usia kerja dapat menggunakan sumber publikasi data resmi tahunan dari BPS, yaitu data penduduk yang berstatus bekerja (working). Berikut adalah contoh tampilan tabel data yang bisa digunakan:

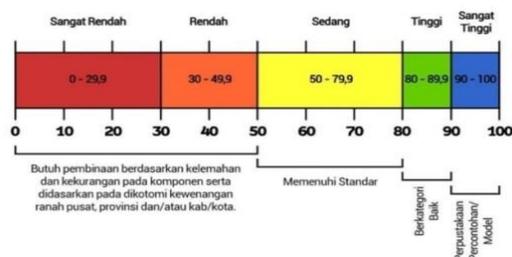


Gambar 12. Contoh Laman Laporan BPS Populasi Bekerja Kab. Klaten

Terkait komponen angka pembagi rasio kabupaten/kota, untuk membuat skala bagi angka pembagi populasi pada saat pengukuran rasio UPLM bagi kabupaten/kota yang dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Hal ini dilakukan karena adanya anomali angka yang disebabkan faktor tinggi dan rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Kondisi demikian menjadikan ketimpangan angka karena angka rasio di wilayah yang memiliki populasi rendah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki populasi lebih tinggi/padat. Angka rasio kabupaten/kota yang dihasilkan dari hasil

pembagi pedoman pengukuran IPLM tidak menjadi terlalu kecil agar memudahkan dalam penerapan rumus IPLM. Angka pembagi rasio provinsi dan kabupaten/kota diadopsi dari jumlah minimal pemustaka berdasarkan jumlah populasi penduduk pada SNP perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota.

Wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi akan memiliki angka rasio yang lebih logis dan tidak terlampau kecil, akibat angka pembagi populasi yang besar. Untuk pengukuran dalam kajian IPLM, misalnya dapat menggunakan skor indeks menggunakan skala level 100:



Gambar 13. Tingkatan Skor IPLM

Fungsi dari angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan memiliki kesamaan dengan angka pembagi rasio provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan diterapkan pada angka yang dihasilkan setelah rasio UPLM dihitung kemudian dikalikan dengan angka koreksi yang ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan wilayahnya.

### Variabel Penelitian IPLM

Variabel yang digunakan dalam penelitian IPLM adalah variabel Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), Aspek Masyarakat (AM), Angka Pembagi Rasio Kabupaten/Kota, serta Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan. Tahap pengumpulan datanya dibagi dua. Pertama, pengumpulan data pendukung UPLM, antara lain: jumlah semua jenis perpustakaan, jumlah koleksi (satuan judul), jumlah tenaga perpustakaan

(pustakawan dan tenaga teknis), jumlah kunjungan perpustakaan per hari, jumlah perpustakaan terakreditasi dan sesuai SNP, jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi atau kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta jumlah pemustaka yang terdaftar. Kedua, pengumpulan data AM, antara lain jumlah populasi penduduk, luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, jumlah civitas sekolah di semua jenjang (siswa/peserta didik dan guru), jumlah civitas akademik (mahasiswa dan dosen/tenaga pendidik), serta jumlah populasi bekerja.

IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Hal ini dianalisis mulai dari UPLM1 s.d. UPLM7. Untuk contoh, ketika metode pengumpulan data pada IPLM dilakukan secara langsung ke seluruh perpustakaan di Kabupaten X, maka data perpustakaan dalam IPLM, diawali dengan identitas perpustakaan yang terdiri dari email, jenis perpustakaan, nama perpustakaan, Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), nilai akreditasi (diisi jika telah terakreditasi), tahun akreditasi (jika telah terakreditasi), instansi, alamat, nama kepala perpustakaan, nomor telepon. Untuk penjabaran variabel UPLM sebagai berikut:

1. Standar koleksi perpustakaan - ketercukupan koleksi (UPLM2), merupakan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital).

Jumlah koleksi (judul, eksemplar) yang dimiliki oleh perpustakaan berdasarkan klasifikasi per tahun.

Jumlah koleksi (judul, eksemplar) yang tersedia di perpustakaan berdasarkan jenis koleksi per tahun.

Jumlah koleksi (judul, eksemplar) yang dipinjam per tahun.

Jumlah koleksi Konten Lokal (judul, eksemplar) per tahun.

Jumlah koleksi Referensi (judul, eksemplar) per tahun.

2. Standar tenaga perpustakaan - ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3), merupakan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan.

Jumlah SDM (pustakawan dan tenaga teknis) di perpustakaan.

Jumlah Pustakawan yang memiliki SK Fungsional.

Jumlah Pustakawan yang memiliki kualifikasi/latar belakang bidang ilmu perpustakaan.

Jumlah Tenaga Teknis (teknis komputer, ketatausahaan, audio visual) yang memiliki sertifikasi Diklat dari Perpustnas RI).

Jumlah Tenaga Teknis atau Tenaga Pendukung yang tidak memiliki latar belakang keilmuan perpustakaan maupun sertifikasi Diklat Perpustnas RI.

Total jumlah tenaga perpustakaan (tetap dan honorer).

Tenaga perpustakaan mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan standar upah yang berlaku.

Komposisi jumlah SDM perpustakaan.

3. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4), merupakan rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari.

Jumlah total pemustaka (online, onsite) yang berkunjung ke perpustakaan per tahun.

Jumlah kunjungan ke perpustakaan rata-rata per hari selama setahun.

4. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan SNP (UPLM5), merupakan rasio jumlah perpustakaan yang dibina berbasis SNP.

Perpustakaan dibina sesuai SNP.

Perpustakaan berbasis SNP.

Perpustakaan memiliki akses internet bagi pemustaka/pengunjung.

Keberadaan lokasi perpustakaan bagi masyarakat.

Gedung perpustakaan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Area ruang perpustakaan yang dimiliki.

Sarana akses informasi bahan perpustakaan di perpustakaan.

Jenis pelayanan perpustakaan yang ada di perpustakaan.

Jumlah jam layanan pemustaka per hari.

Bentuk kerja sama dengan perpustakaan/instansi lainnya.

Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman) koleksi dari keseluruhan koleksi.

Perpustakaan melakukan survei kepuasan pemustaka paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Dalam penyelenggaraannya, apa saja yang dimiliki perpustakaan.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan Saudara, mengacu pada SNP.

Ada struktur organisasi.

Keterkaitan kebijakan tertulis di perpustakaan yang ditetapkan secara internal.

Kegiatan yang tercakup dalam pengelolaan perpustakaan.

Penyusunan kegiatan perencanaan perpustakaan.

Penerapan prinsip manajemen dalam pelaksanaan perpustakaan.

Pengawasan perpustakaan.

Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan tugas perpustakaan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6), merupakan rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (onsite, online).

Perpustakaan melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan kepada pemustaka, baik secara online maupun onsite.

Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan dilakukan per tahun.

Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan.

6. Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7), merupakan rasio jumlah anggota perpustakaan.

Jumlah anggota perpustakaan (laki-laki, perempuan) dari jumlah pemustaka terdaftar per tahun.

#### Contoh Rencana Pengukuran ILM

##### a. Proses Penyusunan Indeks

Indeks disusun berdasarkan variabel penelitian sebagai indikator ILM dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dan survei pendahuluan. Analisis data statistik dilakukan sebagai proses inputasi data, normalisasi, penentuan ILM, bobot/penimbang, serta tahap akhir dalam agregasi data. Jadi, dapat memperoleh batas bawah, batas atas dari setiap variabel, dan angka indeks.

Secara umum, proses penyusunan indeks dapat digambarkan dalam alur seperti Gambar 14 berikut:



Gambar 14. Alur Proses Penyusunan Indeks

#### b. Analisis Item

Dilakukan dengan menghitung S (skala) item, yaitu suatu nilai yang mewakili rating/judgement dari keseluruhan responden terhadap item yang bersangkutan. Lalu menghitung Q (Indeks Kesepakatan), yaitu suatu nilai yang mencerminkan variasi item.

#### c. Analisis Penskalaan Respon

Dilakukan dengan menempatkan pilihan jawaban di sepanjang suatu kontinum kuantitatif sehingga ditemukan titik letak masing-masing pilihan jawaban. Hasilnya dijadikan nilai (method of summated rating) yang mentransformasikan jenjang pilihan jawaban skala ordinal menjadi interval.

#### d. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabilitas dapat digunakan Cronbach's Alpha yang mencerminkan reliabilitas semua indikator. Jenis validitas dalam Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS), yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

#### e. Analisis Data Statistik

Jika beberapa aspek tidak terukur secara langsung (variabel laten), maka analisis data statistik dapat menggunakan metode statistik SEM-PLS. Hal ini untuk memaksimalkan variansi dari variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen, selain untuk menganalisis beberapa variabel ILM secara bersamaan atau simultan.

#### Variabel Penelitian ILM

Definisi konseptual variabel penelitian diukur dengan kemampuan membaca, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, pemahaman

bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan, serta transformasi menjadi produk/jasa. Kemampuan didefinisikan dengan performa perilaku responden yang tidak diukur secara langsung untuk membentuk ILM. Untuk definisi operasionalnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan membaca diidentifikasi melalui perilaku membaca seseorang. Semakin sering seseorang membaca, maka diharapkan orang tersebut mampu merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca. Indikator pada variabel kemampuan membaca, antara lain:

Frekuensi menyerap informasi dan pengetahuan dengan mengakses perpustakaan (baik secara online maupun secara langsung) dalam 1 bulan.

Durasi menyerap informasi dan pengetahuan dengan mengakses perpustakaan (baik secara online maupun secara langsung) dalam 1 minggu.

Frekuensi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media cetak (surat kabar/ majalah/tabloid) dalam 1 bulan.

Durasi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media cetak (surat kabar/ majalah/tabloid) dalam 1 minggu.

Frekuensi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media elektronik (televisi/radio) dalam 1 bulan.

Durasi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media elektronik (televisi/radio) dalam 1 minggu

Frekuensi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media online dan atau sosial media (Blog/Web pribadi/Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp/Line/Youtube).

Durasi menyerap informasi dan pengetahuan melalui media media online dan atau sosial media (Blog/Web pribadi/Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp/Line/ Youtube).

Jumlah buku yang dibaca dalam 1 bulan.

Durasi membaca buku dalam 1 minggu.

b. Kemampuan berbicara, diidentifikasi melalui seberapa sering seseorang mengungkapkan atau mengekspresikan pikiran, gagasan dan perasaan

dalam bentuk kata-kata. Indikator pada variabel kemampuan berbicara, misalnya:

Frekuensi menyampaikan kembali hasil bacaan kepada orang lain secara lisan dalam forum resmi (misalnya: sekolah, kuliah, seminar, kongres, pelatihan/workshop dalam 1 bulan).

Frekuensi menyampaikan kembali hasil bacaan kepada orang lain secara lisan dalam forum informal, untuk tujuan komunikasi dalam 1 bulan.

c. Kemampuan menulis, didefinisikan sebagai kesanggupan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan maksud atau pesan tertentu yang diinginkannya dan diwujudkan dalam sebuah tulisan. Indikator pada variabel kemampuan menulis, misalnya

Frekuensi menyampaikan kembali hasil bacaan kepada orang lain berupa tulisan dalam bentuk buku atau makalah.

Frekuensi menyampaikan kembali hasil bacaan kepada orang lain berupa tulisan dalam bentuk artikel di media cetak.

Frekuensi menyampaikan kembali hasil bacaan kepada orang lain secara utuh berupa tulisan di media online (web/blog) dan media sosial.

d. Pemahaman bacaan, didefinisikan sebagai kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan dalam bacaan sehingga dapat membuat kesimpulan atas bacaannya. Variabel pemahaman bacaan diidentifikasi dari seberapa sering responden membuat resume/kesimpulan atas hasil bacaannya, dengan indikator seperti:

Frekuensi membuat resume atau kesimpulan atas hasil untuk tujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan.

Frekuensi membuat resume atau kesimpulan atas hasil untuk tujuan komunikasi.

Eksplorasi pengetahuan, diidentifikasi melalui seberapa sering seseorang melakukan penjelajahan dengan tujuan memperoleh informasi lebih banyak dari hasil bacaan. Indikatornya seperti:

Upaya untuk mendapatkan informasi/pengetahuan. Artinya, berapa kali responden berupaya menambah pengetahuan dengan cara menelusur/mencari informasi.

Klarifikasi/penjelajahan terhadap informasi yang diperoleh dengan mengevaluasi informasi yang didapatkan.

Transformasi menjadi pengetahuan, didefinisikan sebagai kemampuan merubah informasi sehingga dapat dipraktikkan/diaplikasikan agar memiliki nilai tambah. Artinya, informasi yang dicerna/dibaca dapat digunakan sebagai dasar bertindak oleh responden. Indikatornya adalah:

Penggunaan informasi yang diolah menjadi pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan.

g. Transformasi menjadi produk/jasa, diidentifikasi sebagai kemampuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Indikatornya adalah:

Penciptaan produk/ jasa berdasarkan informasi yang diperoleh.

Preferensi kegiatan pengembangan diri dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), dapat ditanyakan kepada responden dengan menetapkan karakteristiknya. Hal ini misalnya: masyarakat umum yang sudah bekerja (baik dalam sektor formal maupun non formal), masyarakat umum yang sedang tidak bekerja (pensiunan/pengangguran), masyarakat umum usia sekolah yang sudah putus sekolah dan bekerja, pelajar SD/SMP/SMA/SMK dan santri madrasah, mahasiswa perguruan tinggi/akademi/sekolah tinggi, maupun ibu rumah tangga murni usia produktif. Beberapa indikator dalam TPBIS, antara lain:

Aktivitas yang dilakukan untuk mengisi waktu luang;

Aktivitas yang dilakukan merupakan bakat;

Minat dengan aktivitas yang dilakukan;

Aktivitas yang dilakukan merupakan hobi atau dalam rangka menambah penghasilan;

Literatur yang diharapkan tersedia di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi;

Jenis kegiatan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan diri terkait TPBIS.

Variabel penyedia informasi (lembaga informasi) yang sering diakses oleh responden, dengan skala pengukuran nominal (Ya/Tidak), indikatornya antara lain:

Perpustakaan (kunjungan langsung maupun melalui online);

Situs/website termasuk pangkalan data/database yang disediakan oleh Lembaga/instansi/ organisasi;

Toko buku;

Media elektronik (televisi/radio);

Media cetak (surat kabar/majalah/ tabloid);

Media online maupun media sosial (Blog/Web pribadi/Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp/Line/Youtube).

Variabel kemudahan terhadap akses informasi dengan skala pengukuran (1) Tidak pernah; (2) 1 kali; (3) 2 - 4 kali; (4) > 4 kali. Indikator dari kemudahan terhadap akses informasi, antara lain:

Kemudahan mendapatkan buku sesuai dengan kebutuhan;

Kemudahan mengakses buku di perpustakaan (kunjungan langsung maupun melalui online);

Kemudahan mengakses informasi dari internet situs/website termasuk pangkalan data/database yang disediakan;

Kemudahan mengakses informasi dari internet (media online) maupun media sosial (Blog/Web pribadi/Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp/Line/Youtube).

Kemudahan mengakses informasi di media cetak (surat kabar/majalah/tabloid).

Perencanaan Kajian IPLM dan ILM

Jadwal kegiatan yang dirancang bisa direncanakan dari mulai pembuatan proposal dan perjanjian kerja, kelengkapan survei, legalitas dan

administrasi, rekrutmen surveyor, TOT tim surveyor, koordinasi tim teknis dengan perpustakaan, koordinasi tim teknis dan surveyor, kegiatan survei dan input data (harian), pengolahan data, pembuatan laporan akhir, kemudian koordinasi dengan perpustakaan untuk fixing laporan akhir.

Dana yang digunakan dalam penelitian dapat dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) penelitian, dengan komponen biaya langsung personil dan biaya tidak langsung. Untuk rencana anggaran yang dibutuhkan dalam penelitian IPLM dan ILM, dapat dirinci, misalnya:

- Biaya langsung personil (tenaga ahli tim peneliti, tenaga pendukung termasuk surveyor dan tim administrasi);
- Biaya tidak langsung, berupa biaya barang habis pakai (alat tulis kantor, souvenir, transportasi akomodasi, konsumsi rapat koordinasi, konsumsi FGD, operasional seminar hasil penelitian); biaya penyusunan laporan (misalnya pendahuluan, hasil survei, antara, akhir, serta bahan paparan).

Suatu contoh pada saat melakukan kajian IPLM di Kabupaten X, maka populasinya dapat mencakup jenis Perpustakaan Umum Kabupaten X, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Selanjutnya pengukuran IPLM dilakukan dengan pendekatan sensus agar lebih akurat, cakupannya lengkap, terbebas dari kesalahan sampel, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan ke depan. Artinya, untuk mengetahui keterwakilannya maka penelitian dilakukan dengan mengambil satu kelompok populasi tertentu sebagai sampel secara keseluruhan, kemudian menggunakan kuesioner terstruktur untuk pengambilan data yang spesifik.

Pengambilan data dalam survei maupun sensus yang berupa data primer dan sekunder, dapat dilakukan oleh enumerator dan surveyor yang berpengalaman dan telah mendapatkan arahan dari tim peneliti. Pengambilan data wajib disertai dengan dokumentasi bukti yang valid untuk pelaporan. Dalam praktiknya, tingkat literasi responden akan mempengaruhi jawaban hasil survei. Sebagaimana yang disebutkan Olson,

et al. (2011), bahwa terdapat hubungan antara literasi responden dan kualitas data survei.

Metode pengambilan sampling untuk penelitian ILM dilakukan dengan teknik probability sampling. Kuota sampling jenis kelamin dan pendidikan terakhir disesuaikan dengan profil penduduk berdasarkan data BPS. Berdasarkan teori sampling probabilistik, jumlah sampel dihitung sehingga memenuhi tingkat kepercayaan sampling 90% dan margin of error 5%. Dari rumus Slovin diperoleh jumlah sampel yang dijadikan respondennya.

Contoh rencana analisis data untuk IPLM dapat dilakukan dengan deskriptif menggunakan visualisasi jaring laba-laba. Untuk analisis data ILM dilakukan uji validitas terhadap data responden menggunakan metode SEM dan yang diuji adalah variabel utama sebagai pembentuk ILM. Analisis data diawali dengan karakteristik responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, pengeluaran pribadi/bulan, serta status dan bidang pekerjaan. Selanjutnya menghitung distribusi frekuensi dan penghitungan bobot dari jawaban responden pada variabel utama pembentuk ILM. Pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan dan menghasilkan beberapa luaran, mulai dari input dan preprocessing data, proses olah data, analisis dan pembahasan, simpulan, sampai dengan pembuatan infografis.

## **PENUTUP**

### Simpulan

Simpulan dari bahasan terkait bagaimana rencana mengukur IPLM dan ILM diharapkan dapat memberikan gambaran awal kepada para pemangku kepentingan dalam melakukan kajian IPLM dan ILM. Perpustakaan RI telah membuat dan menerbitkan beberapa pedoman pengukuran, yaitu: pedoman pengukuran IPLM, pedoman pengukuran pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Indonesia, maupun pedoman tingkat gemar masyarakat masyarakat. Pedoman pengukuran digunakan sebagai alat ukur baku, format baku penyajian, pengelolaan data dan sistem data, maupun mewujudkan akselerasi dan peningkatan kinerja.

Dari hasil pengukuran IPLM dan ILM diharapkan bisa memberikan sumbang saran atau rekomendasi terkait dengan pembangunan perpustakaan di daerah yang diteliti. Hal ini terkait usulan perbaikan, grand design, dan milestone (jangka pendek, menengah, jangka panjang) dalam rangka pemetaan program dan target sesuai daerahnya. Selain itu, juga evaluasi kebijakan selanjutnya terkait dengan peningkatan IPLM dan ILM. Rekomendasi IPLM dimulai dari UPLM1 sampai dengan UPLM7, sedangkan rekomendasi ILM dapat dianalisis kekurangannya dari kelima variabel ILM. Oleh karena membaca menjadi aspek utama dalam membentuk literasi masyarakat, maka perpustakaan diharapkan dapat menangkap peluang dan tertantang untuk melakukan kajian IPLM dan ILM.

### Usulan Kajian Lanjutan

Perencanaan kajian IPLM dan ILM perlu diagendakan untuk penentuan kebijakan penyusunan program perpustakaan. Gambaran awal terkait bagaimana rencana mengukur IPLM dan ILM dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut. Penelitian IPLM dan ILM perlu dilakukan di masing-masing daerah karena hasilnya dapat digunakan dan dipertimbangkan sebagai acuan atau panduan bersama oleh Perpustakaan RI, Dinas Perpustakaan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun stakeholder terkait untuk pengambilan

kebijakan dalam program peningkatan indeks literasi, serta diperolehnya berbagai variabel pembentuk indeks literasi di masing-masing daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariestonandri, P. 2020. *Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*. Jakarta: Sigma Research.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Klaten Dalam Angka 2022*. Diakses melalui <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/87d9e9c7356ad4ce4872b70f/kabupaten-klaten-dalam-angka-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>.
- Biao, et al. 2014. The Contribution of the Human Development Index Literacy Theory to the Debate on Literacy and Development. *World Journal of Education*, 4(2), 2014, 1-12. <https://doi.org/10.5430/wje.v4n3p1>.
- Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Tersedia di <https://pappbb.perpusnas.go.id/dataiplm>.
- Enyon. A. 2013. Welsh Information Literacy Project. *Library and Information Research*. 37(114). 17-22. doi:10.29173/lirg558.
- Fang, Z. and Wei, Y. 2010. Improving Middle School Students' Science Literacy Through Reading Infusion. *The Journal of Educational Research*, 103(4), 262-273. doi:10.1080/00220670903383051.
- Fatmawati, E. 2022. Peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Melalui Pengukuran Indeks Gemar Membaca (IGM). *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(2), 341-358. <http://dx.doi.org/10.29240/tik.v6i2.5498>.
- Fatmawati, E. 2021. *Layanan Perpustakaan Sekolah: Panduan Bagi Pemula*. Yogyakarta: Deepublish.
- Guo, et al. 2022. An Evaluation of The Information Literacy of Safety Professionals. *Safety Science*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105734>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.
- Olson, et al. 2011. The Self-Assessed Literacy Index: Reliability and Validity. *Social Science Research*, 40, 1465-1476. doi: 10.1016/j.ssresearch.2011.05.002.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.
- Perpustakaan Nasional RI. 2021. *Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*. Jakarta: Perpusnas RI.
- Perpustakaan Nasional. 2021. *Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*. Jakarta: Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI.

- Shelton, S. A., Guy, Kelsey, H., Jones, A. M. 2020. "These Kids are Rebellious": A Student-Led Transformation of Community and Critical Literacy. *English Teaching Practice & Critique*, 19(1), 65-78. <https://doi.org/10.1108/ETPC-05-2019-0072>.
- Warsito, B., dkk. 2022. Seminar Hasil Penelitian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) di Kota Salatiga. Kerjasama antara Dispersip Kota Salatiga dengan LPPM Undip. Salatiga, 11 Agustus 2022.